



ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Arifman Zebua^{1*}, Roni Ekha Putera¹, Karnedi¹

¹Universitas Terbuka, Sumatera Barat, Padang, Indonesia

* Corresponding Author: arifmtw@gmail.com

Article Information

Submitted : 23/07/2023
Review : 05/08/2023
Accepted : 21/09/2023
Published : 30/10/2023

DOI

<https://doi.org/10.25077/jakp.8.2.265-279.2023>

Key Word

Communication; Resources, Disposition; Bureaucratic Structure; Policy Implementation; Covid-19 Vaccination.

Abstract

This study aims to analyze the influence of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure on the implementation of Covid-19 vaccination policies in the Health Office of Mentawai Islands Regency, West Sumatra Province. The research employed a quantitative method with total sampling distributed to respondents, along with secondary data from various related sources. The results of the classical assumption tests showed that the residual data was normally distributed, with no heteroskedasticity and no multicollinearity issues. Multiple linear regression analysis revealed that communication, resources, disposition, and bureaucratic structure collectively had a significant impact on the implementation of Covid-19 vaccination policies ($F = 63.348, p < 0.05$). Partial t -test results indicated that each independent variable, namely communication ($p = 0.000$), resources ($p = 0.037$), disposition ($p = 0.010$), and bureaucratic structure ($p = 0.042$), significantly influenced policy implementation. The R-squared value showed that 73.8% of the variation in policy implementation could be explained by these four independent variables, while the remaining 26.2% was influenced by other unexamined variables. Communication, resources, disposition, and bureaucratic structure are key factors in enhancing the implementation of Covid-19 vaccination policies in the Health Office of Mentawai Islands Regency. The study's findings align with previous research and underscore the importance of internal factors in the successful execution of policies. The recommendations resulting from this study include improving internal communication, optimizing resource allocation, enhancing disposition, and refining bureaucratic structures to support more effective policy implementation in addressing the Covid-19 pandemic. The implications of this research can assist relevant stakeholders in formulating and implementing vaccination policies and improving responses to public health situations.

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah kebutuhan dasar yang tak dapat diabaikan oleh setiap individu. Kesehatan bukan hanya menyangkut kehidupan yang sejahtera, tetapi juga merupakan modal dasar untuk perkembangan masyarakat dan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh warga negara menerima layanan medis berkualitas yang memenuhi kebutuhan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dihadapkan pada berbagai masalah. Tugas pemerintah atau pelayan publik adalah untuk mencari solusi melalui kebijakan publik yang efektif. Salah satu tantangan terbesar yang melanda dunia saat ini adalah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pandemi ini telah mengguncang seluruh dunia, dengan hampir 200 negara, termasuk Indonesia, terkena dampaknya. Pemerintah di seluruh dunia telah merespons dengan berbagai upaya pencegahan, termasuk pengenalan konsep pembatasan sosial seperti blokade dan praktik jarak sosial (social distancing) sebagai upaya untuk memutus mata rantai penularan virus Covid-19 (Supriatna, 2020).

Salah satu langkah kunci yang diambil oleh pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 adalah pelaksanaan program vaksinasi Covid-19. Program ini melibatkan kolaborasi antara tenaga medis, pemerintah, dan lembaga kesehatan seperti Dinas Kesehatan.

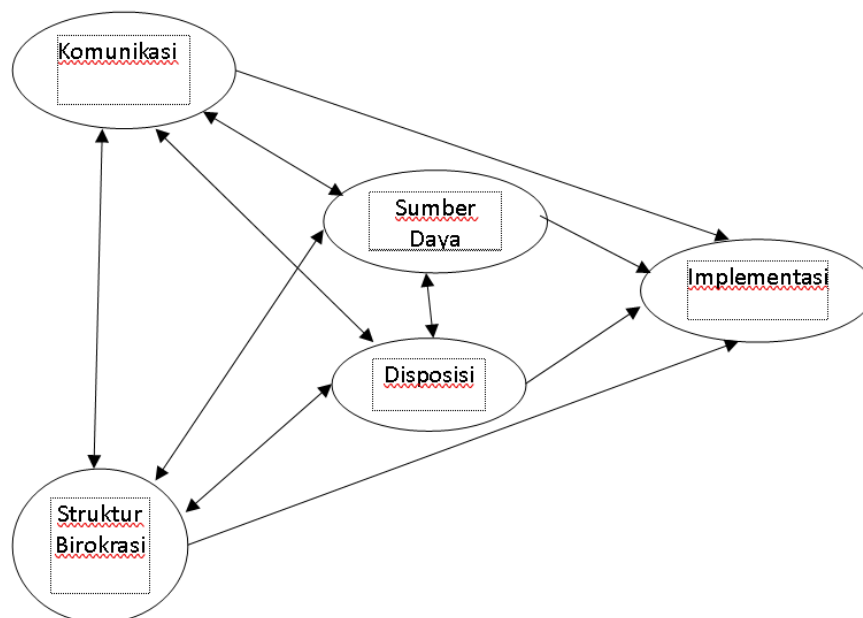
Namun, data observasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan pada tanggal 1 Agustus 2021 mengungkapkan bahwa dari jumlah sasaran vaksinasi sebanyak 74.375 jiwa, capaian Vaksinasi I baru mencapai 24,35% (18.109 jiwa), dan Capaian Vaksinasi II hanya sebesar 10,94% (8.140 jiwa). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan vaksinasi Covid-19 belum merata dalam mencakup seluruh masyarakat yang seharusnya mendapatkan vaksin.

Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai mengambil inisiatif untuk mengimplementasikan kebijakan vaksinasi Covid-19 dengan lebih efektif. Implementasi kebijakan ini didasarkan pada teori Edward III, yang mengidentifikasi beberapa faktor krusial yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan adalah tahap krusial dalam siklus kebijakan, karena sebaik apapun suatu kebijakan, jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik dalam pelaksanaannya, maka tujuan kebijakan publik tidak akan tercapai.

Mengingat hal tersebut, perumusan kebijakan dan pelaksanaannya harus dipersiapkan

dengan baik. Evaluasi implementasi, menurut Edward III, mencakup empat variabel krusial: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini beroperasi secara bersama-sama dan saling berinteraksi satu sama lain, seperti yang terlihat dalam gambar 1.berikut:

Gambar 1. Empat Faktor Implementasi Kebijakan Publik



Sumber: Edward III 1980

Menurut Riswandi (2009), komunikasi adalah proses berbagi informasi dan pemahaman bersama, yang merupakan elemen penting dalam menjalankan kebijakan vaksinasi. Sumber daya, seperti yang dijelaskan oleh Hasibuan (2013), mencakup keterampilan dan daya fisik yang diperlukan untuk menjalankan vaksinasi dengan efektif. Disposisi, sebagaimana dikemukakan oleh Widodo (2015), mencakup kemauan dan kecenderungan para aktor politik untuk melaksanakan kebijakan ini dengan sungguh-sungguh. Terakhir, struktur birokrasi, sebagaimana didefinisikan oleh Dwijowijoto (2004), adalah lembaga yang kuat yang memiliki peran penting dalam mencapai tujuan kebijakan vaksinasi. Dengan memahami empat faktor ini dan bagaimana mereka saling berinteraksi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai berharap dapat meningkatkan capaian vaksinasi Covid-19 dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat memperoleh manfaat dari program vaksinasi ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik Total Sampling, yang berarti semua elemen dalam populasi penelitian diikutsertakan dalam analisis. Fokus

penelitian ini adalah pada variabel-variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini termasuk data kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara dengan karyawan dan atasan. Data kuantitatif diperoleh dari hasil angket yang diberikan kepada sampel penelitian. Kuesioner digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data primer, dan informasi sekunder didapatkan dari sumber-sumber seperti media massa, peraturan, dan perundang-undangan yang relevan dengan pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Versi 24.0. Proses analisis mencakup tahap-tahap berikut: Analisis Validitas: Validitas instrumen digunakan untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan dalam kuesioner benar-benar mengukur variabel yang dimaksud. Analisis Reliabilitas Instrumen: Reliabilitas instrumen adalah ukuran sejauh mana alat ukur konsisten dalam mengukur variabel yang sama. Ini digunakan untuk memastikan bahwa alat ukur memiliki tingkat konsistensi yang tinggi. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang data yang dikumpulkan, termasuk statistik ringkasan seperti mean, median, dan deviasi standar.

Uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas digunakan untuk memeriksa apakah data terdistribusi normal. Uji multikolinearitas digunakan untuk memeriksa apakah ada hubungan erat antara variabel-variabel independen. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk memeriksa apakah ada variasi yang tidak konstan dalam data.

Regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel independen (komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi) dan variabel dependen (implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19). Ini membantu dalam mengidentifikasi apakah variabel independen memiliki pengaruh statistik yang signifikan terhadap variabel dependen. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19, serta memberikan wawasan yang berharga bagi perbaikan kebijakan di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal (Hair, 2006).

Untuk mendeteksi uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas ini adalah dengan melihat probabilitas Asymp. Sig (2-tailed). Jika probabilitas Asymp. Sig (2-tailed) > $\alpha=0,05$, maka residual data tersebut berdistribusi normal. Berikut ini disajikan hasil uji normalitas menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov Test*. Berdasarkan perhitungan melalui komputer dengan menggunakan program IBM SPSS for Windows Versi 24.0, diperoleh hasil:

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Asymp. Sig	Nilai Batas	Keterangan
<i>Standardized Residual</i>	0,200	0,05	Normal

Sumber: Data Primer, Hasil Olah Data IBM SPSS Ver. 24.0, Tahun 2022.

Pada tabel 1 di atas dapat dilihat dimana variabel residual yang distandarkan mempunyai nilai signifikan sebesar $0,200 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pengganggu (residual) pada setiap variabel adalah terdistribusi secara normal.

B. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan Uji Glejser. Uji Glejser ini dilakukan dengan cara meregres variabel bebas terhadap nilai residualnya yang telah *unstandardized*. Bila nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 maka berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Berdasarkan perhitungan melalui komputer dengan menggunakan program IBM SPSS for Windows Versi 24.0, diperoleh hasil:

Tabel 2. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Residual Absolute (RES_ABS)	
	Signifikan	Kesimpulan
Komunikasi	0,168	Bebas Heteroskedastisitas
Sumber Daya	0,106	Bebas Heteroskedastisitas
Disposisi	0,742	Bebas Heteroskedastisitas
Struktur Birokrasi	0,550	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer, Hasil Olah Data IBM SPSS Ver. 24.0, Tahun 2022.

Dari tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikan variabel-variabel memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi adalah baik atau tidak terjadi heteroskedastisitas (bebas heteroskedastisitas).

C. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sesama variabel bebas saling mempengaruhi dalam model regresi. Cara menentukan ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* < 0,10 atau nilai VIF > 10 maka terdapat multikolinearitas, jika nilai *tolerance* > 0,10 atau nilai VIF < 10 maka tidak terdapat multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas ini berdasarkan perhitungan melalui komputer dengan menggunakan program IBM SPSS for Windows Versi 24.0, diperoleh hasil dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Variabel bebas	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Komunikasi	0,256	3,912	Bebas Multikolinearitas
Sumber Daya	0,219	4,562	Bebas Multikolinearitas
Disposisi	0,196	5,091	Bebas Multikolinearitas
Struktur Birokrasi	0,157	6,377	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Data Primer, Hasil Olah Data IBM SPSS Ver. 24.0, Tahun 2022.

Dari tabel 3 di atas dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dinyatakan bebas dari multikolinearitas karena keempat variabel bebas tersebut mempunyai nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan

VIF lebih kecil dari 10.

D. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat (dependent). Besarnya pengaruh variabel-variabel bebas dengan variabel terikat dapat dihitung melalui suatu persamaan regresi berganda. Berdasarkan perhitungan melalui komputer dengan menggunakan program IBM SPSS for Windows Versi 24.0, diperoleh hasil:

Tabel 4. Rekap Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koef. Regresi	t hitung	Sig.
Konstanta	6,645	2,208	0,030
Komunikasi	0,830	8,221	0,000
Sumber Daya	0,280	2,131	0,037
Disposisi	0,299	2,622	0,010
Struktur Birokrasi	0,121	2,025	0,042
F hitung = 63,348		Sig. 0,000	
R² = 0,738			

Sumber: Data Primer, Diolah dengan IBM SPSS 24.0 2022.

Dari tabel 4 di atas maka bentuk model persamaan regresi untuk komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

$$Y = 6,645 + 0,830X_1 + 0,280X_2 + 0,299X_3 + 0,121X_4 + e$$

Keterangan dari persamaan di atas:

$\alpha = 6,645$; artinya tanpa adanya pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi maka implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 sudah ada sebesar 6,645 persen.

$b_1 = 0,830$; artinya bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel komunikasi (X_1) terhadap implementasi kebijakan (Y). Hal ini menunjukkan bahwa semakin naik atau meningkat komunikasi, maka akan meningkatkan implementasi kebijakan. Nilai koefisien regresi komunikasi adalah 0,830 artinya setiap peningkatan satu satuan komunikasi maka implementasi kebijakan meningkat sebesar 83 persen.

$b_2 = 0,280$; artinya bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel sumber daya (X_2)

terhadap implementasi kebijakan (Y). Hal ini menunjukkan bahwa semakin naik atau meningkatnya sumber daya, maka akan meningkatkan implementasi kebijakan. Nilai koefisien regresi sumber daya adalah 0,280 artinya setiap peningkatan satu satuan sumber daya maka implementasi kebijakan meningkat sebesar 28 persen.

$b_3 = 0,299$; artinya bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel disposisi (X_3) terhadap implementasi kebijakan (Y). Hal ini menunjukkan bahwa semakin naik atau meningkatnya disposisi, maka akan meningkatkan implementasi kebijakan. Nilai koefisien regresi disposisi adalah 0,299 artinya setiap peningkatan satu satuan disposisi maka implementasi kebijakan meningkat sebesar 29,9 persen.

$b_4 = 0,121$; artinya bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel struktur birokrasi (X_4) terhadap implementasi kebijakan (Y). Hal ini menunjukkan bahwa semakin naik atau meningkatnya struktur birokrasi, maka akan meningkatkan implementasi kebijakan. Nilai koefisien regresi struktur birokrasi adalah 0,121 artinya setiap peningkatan satu satuan struktur birokrasi maka implementasi kebijakan meningkat sebesar 12,1 persen.

E. Uji t (parsial)

Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa:

1) Pengaruh Komunikasi (X_1) terhadap Implementasi Kebijakan (Y)

Hasil analisis pengaruh variabel Komunikasi (X_1) terhadap variabel Implementasi Kebijakan (Y) diperoleh nilai $t_{hitung} = 8,221$ ($df = 95 - 5 = 90$; $t_{tabel} = 1,98667$); ($t_{hitung} > t_{tabel}$), dengan tingkat level signifikan $0,000 < 0,05$, akibatnya hipotesis satu (H1) diterima. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel komunikasi terhadap implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2) Pengaruh Sumber Daya (X_2) terhadap Implementasi Kebijakan (Y)

Hasil analisis pengaruh variabel sumber daya (X_2) terhadap variabel implementasi kebijakan (Y) diperoleh nilai $t_{hitung} = 2,131$ ($df = 95 - 5 = 90$; $t_{tabel} = 1,98667$); ($t_{hitung} > t_{tabel}$), dengan tingkat level signifikan $0,037 < 0,05$, akibatnya hipotesis dua (H2) diterima. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel sumber daya terhadap implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

3) Pengaruh Disposisi (X_3) terhadap Implementasi Kebijakan (Y)

Hasil analisis pengaruh variabel disposisi (X_3) terhadap variabel kinerja (Y) diperoleh nilai $t_{hitung} = 2,622$ ($df = 95 - 5 = 90$; $t_{tabel} = 1,98667$); ($t_{hitung} > t_{tabel}$), dengan tingkat level signifikan $0,0107 < 0,05$, akibatnya hipotesis tiga (H_3) diterima. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel disposisi terhadap implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

4) Pengaruh Struktur Birokrasi (X_4) terhadap Implementasi Kebijakan (Y)

Hasil analisis pengaruh variabel struktur birokrasi (X_4) terhadap variabel kinerja (Y) diperoleh nilai $t_{hitung} = 2,025$ ($df = 95 - 5 = 90$; $t_{tabel} = 1,98667$); ($t_{hitung} > t_{tabel}$), dengan tingkat level signifikan $0,0402 < 0,05$, akibatnya hipotesis empat (H_4) diterima. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

F. Uji F (simultan)

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa Hasil analisis pengaruh komunikasi (X_1), sumber daya (X_2), disposisi (X_3) dan struktur organisasi (X_4) secara bersama-sama terhadap implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 (Y), diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 63,348 dengan probabilitas signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan $df_1 = (k-1) = 4$, $df_2 = 95 - 5 = 90$, $F_{tabel} 2,47$, maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $63,348 > 2,47$, akibatnya Hipotesis diterima. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh signifikan antara variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

G. Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil perhitungan estimasi regresi, diperoleh nilai koefisien determinasi yang disesuaikan atau R Square yaitu 0,738 artinya 73,8 persen variasi dari semua variabel bebas dapat menerangkan variabel tak bebas, sedangkan sisanya sebesar 26,2 persen diterangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Dikarenakan nilai R^2 tidak mendekati atau menjauhi 0 (nol) dan mendekati 1 (satu), maka kontribusi (pengaruh) independent variabel secara simultan terhadap dependent adalah sedang.

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Komunikasi terhadap Implementasi Kebijakan

Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komunikasi terhadap implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hasil analisis pengaruh variabel Komunikasi (X_1) terhadap variabel Implementasi Kebijakan (Y) diperoleh nilai $t_{hitung} = 8,221$ ($df = 95 - 5 = 90$; $t_{tabel} = 1,98667$); ($t_{hitung} > t_{tabel}$), dengan tingkat level signifikan $0,000 < 0,05$, akibatnya hipotesis satu (H_1) diterima. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel komunikasi terhadap implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Hasil penelitian ini memberikan indikasi bahwa komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai ditentukan oleh komunikasi.

Hasil penelitian ini sejalan dan mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Muazaroh dkk (2009), T.A.P, dkk (2021), Seputra (2020), yang menyatakan bahwa faktor komunikasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Sehingga dapat disimpulkan komunikasi akan mempengaruhi dalam meningkatkan implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19

B. Pengaruh Sumber Daya terhadap Implementasi Kebijakan

Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sumber daya terhadap implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hasil analisis pengaruh variabel sumber daya (X_2) terhadap variabel implementasi kebijakan (Y) diperoleh nilai $t_{hitung} = 2,131$ ($df = 95 - 5 = 90$; $t_{tabel} = 1,98667$); ($t_{hitung} > t_{tabel}$), dengan tingkat level signifikan $0,037 < 0,05$,

akibatnya hipotesis dua (H2) diterima. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel sumber daya terhadap implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Hasil penelitian ini memberikan indikasi bahwa sumber daya berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai ditentukan oleh sumber daya.

Hasil penelitian ini sejalan dan mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariyani, dkk (2014), Yalia (2014), Aristin & Azizah (2018), yang menyatakan bahwa sumber daya berpengaruh terhadap implementasi kebijakan.

Sehingga dapat disimpulkan sumber daya akan mempengaruhi dan meningkatkan implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19.

C. Pengaruh Disposisi terhadap Implementasi Kebijakan

Tujuan ketiga dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh disposisi terhadap implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hasil analisis pengaruh variabel disposisi (X_3) terhadap variabel kinerja (Y) diperoleh nilai $t_{hitung} = 2,622$ ($df = 95 - 5 = 90$; $t_{tabel} = 1,98667$); ($t_{hitung} > t_{tabel}$), dengan tingkat level signifikan $0,0107 < 0,05$, akibatnya hipotesis tiga (H3) diterima. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel disposisi terhadap implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Hasil penelitian ini memberikan indikasi bahwa disposisi berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai ditentukan oleh disposisi.

Hasil penelitian ini juga mendukung dan sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Herdiana (2021) dan Muazaroh dkk (2009), yang mengemukakan bahwa disposisi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan.

Sehingga dapat disimpulkan disposisi akan mempengaruhi dan meningkatkan

implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19.

D. Pengaruh Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Kebijakan

Tujuan keempat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hasil analisis pengaruh variabel struktur birokrasi (X_4) terhadap variabel kinerja (Y) diperoleh nilai $t_{hitung} = 2,025$ ($df = 95 - 5 = 90$; $t_{tabel} = 1,98667$); ($t_{hitung} > t_{tabel}$), dengan tingkat level signifikan $0,0402 < 0,05$, akibatnya hipotesis empat (H_4) diterima. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Hasil penelitian ini memberikan indikasi bahwa struktur birokrasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai ditentukan oleh struktur birokrasi.

Hasil penelitian ini sejalan dan mendukung hasil penelitian yang dikemukakan oleh Muazaroh dkk (2009) dan T.A.P, dkk (2021), yang menyatakan bahwa struktur birokrasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Sehingga dapat disimpulkan struktur birokrasi akan mempengaruhi dan meningkatkan implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19.

E. Pengaruh Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Kebijakan

Tujuan kelima dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Berdasarkan penelitian, implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah baik dilihat dari tanggapan responden (TCR) sebesar 82,27 persen, menyatakan bahwa implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 adalah baik. Hal ini berarti bahwa implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah baik

dalam melaksanakan implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19, pekerjaan ini sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan berusaha untuk menyelesaikannya tepat sasaran pada waktunya.

Pengujian hipotesis, dari uji ANOVA (Uji Simultan / Uji F), hasil analisis pengaruh komunikasi (X_1), sumber daya (X_2), disposisi (X_3) dan struktur organisasi (X_4) secara bersama-sama terhadap implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 (Y), diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 63,348 dengan probabilitas signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan $df_1 = (k-1) = 4$, $df_2 = 95 - 5 = 90$, $F_{tabel} 2,47$, maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $63,348 > 2,47$, akibatnya Hipotesis diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima (H_5) yang berbunyi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai diterima.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariyani dkk (2014), menemukan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap implementasi kebijakan publik. Sehingga dapat disimpulkan komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi akan mempengaruhi dan meningkatkan implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19.

PENUTUP

Ketika dipertimbangkan secara bersama-sama, keempat faktor ini - komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi - secara signifikan memengaruhi implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19. Meningkatkan aspek-aspek ini dapat menghasilkan implementasi kebijakan yang lebih efektif.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan pentingnya faktor-faktor internal dalam meningkatkan implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Organisasi perlu berfokus pada pengembangan dan perbaikan aspek-aspek ini untuk memastikan pelaksanaan kebijakan vaksinasi berjalan dengan baik. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam menangani pandemi Covid-19 saat ini, memberikan wawasan berharga untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan.

Pada akhirnya, penelitian ini menyoroti peran krusial faktor internal dalam membentuk kesuksesan implementasi kebijakan, terutama dalam konteks penanganan krisis Covid-

19 yang sedang berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristin, R., & Azizah, Ri. N. (2018). Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Desa Kaduara Timur Sumenep Madura. *Reformasi*, 8(2).
- Ariyani, D., Hakim, A., & Noor, I. (2014). Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Pelaksana, dan Struktur Birokrasi Terhadap Output Implementasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Probolinggo. *Jurnal PAL*, 5(2), 15–21.
- Berelson, B., & Steiner, G. A. (2000). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Rosdakarya.
- Dharma, S. (2010). *Manajemen Kinerja*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwijowijoto, R. N. (2004). *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Gavamedia.
- Hasibuan, M. S. P. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Herdiana, D. (2021). Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *Jurnal Kesehatan*.
- Hovland, C. I., Janis, I. K., & Kelley, H. H. (1953). *Communication and Persuasion*. New Heaven Ct: Yale University Press.
- Muazaroh, Martha, K. I., & Lucia, D. M. S. P. . W. K. R. (2009). Analisis Implementasi Program Imunisasi Hepatitis B-0 Pada Bayi Umur 0-7 Hari Oleh Bidan Desa di Kabupaten Demak 2009. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*.
- Riswandi. (2009). *Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Seputra, I. I. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Penanggulangan Covid-19 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420.
- Stoner, James, A., & Freeman, R. E. (2012). *Management* (4th Editio). Englewood Cliffts, NJ, ; Prentice Hall Incorporation.
- Supriatna, E. (2020). Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, 7(6).
- T.A.P, R. M. A., Virdani, D., Kasih, K. D., & Arif, L. (2021). Implementasi Kebijakan Vasinasi Covid-19 di Kota Surabaya. *Jurnal Publicuho*, 4(2), 501–510.

Wahab, S. A. (2012). *Analisi Kebijakan Dari Formulasi Kebijaksanaan Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, S. E. (2015). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Yalia, M. (2014). Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional di Jawa Barat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 6(1), 149–160